

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH DAN DANA ALOKASI
UMUM TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI
PERTUMBUHAN EKONOMI
(Studi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Periode 2008-2013)**

**Ni Kadek Herni Wijayanti¹
Ida Bagus Darsana²**

^{1,2}Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana (Unud), Bali, Indonesia
e-mail: herniwijayanti94@yahoo.com

ABSTRAK

Kesejahteraan masyarakat merupakan salah satu tujuan yang diharapkan oleh setiap daerah. Dalam mencapai tujuan tersebut diperlukannya sumber-sumber pembiayaan, baik dari pusat maupun dari kemampuan daerah dalam menjaring pendapatan asli daerahnya. Sumber pembiayaan itulah yang nantinya digunakan untuk pelaksanaan pembangunan sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan selanjutnya berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat. Tujuan penelitian ini yaitu untuk menganalisis pengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali. Penelitian ini menggunakan data sekunder dan *Path analysis* sebagai teknik analisis. Hasil analisis menunjukkan PAD dan DAU memiliki pengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. PAD dan DAU tidak berpengaruh langsung terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat. Pertumbuhan ekonomi merupakan variabel yang memediasi secara penuh dalam pengaruh PAD dan DAU terhadap kesejahteraan masyarakat

Kata Kunci: pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat

ABSTRACT

Public welfare is one of the goals expected by each region. In achieving these objectives need financing sources, both from the center and from the region's ability to capture the local revenue. That funding source that will be used for the implementation of development so as to enhance economic growth and further positive impact on the welfare of the community. The purpose of this study is to analyze the effect of directly or indirectly influence local revenues and a general allocation of funds for public welfare through economic growth in the province of Bali. This study uses secondary data and Path analysis as analysis techniques. The analysis showed PAD and DAU has a significant and positive impact on economic growth. PAD and DAU do not directly affect the welfare of society, while economic growth is positive and significant effect on the welfare of society. Economic growth is a variable that mediates fully in effect PAD and DAU to the welfare of society

Keywords: local revenues, general allocation fund, economic growth, public welfare

PENDAHULUAN

Kesejahteraan masyarakat adalah salah satu tujuan yang diharapkan oleh setiap daerah tidak terkecuali bagi kabupaten/kota yang ada di Provinsi Bali.

Berbagai upaya dirancang dan dilaksanakan oleh pemerintah daerah semata-sama guna meningkatkan pertumbuhan bagi daerah itu sendiri dan selanjutnya diharapkan akan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakatnya. Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mencapai tujuannya yakni dengan adanya pelaksanaan pembangunan sebagai wujud desentralisasi. Menurut Dewi dan Sutrisna (2014:32), menyatakan bahwa kesejahteraan masyarakat menjadi salah satu tujuan akhir dari terwujudnya pemerintahan yang efektif dan efisien dalam rangka terciptanya desentralisasi fiskal. Pembangunan sosial ekonomi yang mencerminkan kesejahteraan masyarakat pada suatu wilayah diharapkan dapat terwujud oleh upaya-upaya yang dilakukan pemerintah daerah (Akudugu,2012). Upaya pelaksanaan pembangunan pada setiap daerah merupakan bagian dari terselenggaranya pelaksanaan otonomi daerah. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan suatu upaya dari pemerintah pusat yang memberikan tanggung jawab atau wewenangnya kepada pemerintah daerah dalam mengurus, mengatur dan mengelola rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan dalam perundang-undangan dan prinsip-prinsip otonomi daerah. Menurut Sriningsih (2013:2), menyatakan bahwa pada dasarnya, otonomi daerah merupakan salah satu upaya pemberdayaan daerah yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam rangka proses pengelolaan pembangunan. Prinsip otonomi daerah menyebutkan otonomi yang seluas-luasnya dengan arti pemerintah daerah diberikan tanggung jawab dalam mengurus, mengatur dan mengelola segala urusan rumah tangganya diluar urusan pemerintah pusat (Maryati dan Endrawati, 2010:1).

Menurut Jhingan (2000:69), pembangunan ekonomi adalah salah satu dari berbagi upaya yang ada, yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah dalam menuju pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat sehingga setiap perencanaan dalam pembangunan akan mempertimbangkan semua potensi ekonomi. Perencanaan pembangunan dipandang sebagai pedoman atau panutan agar dapat menghasilkan pembangunan ke arah yang positif atau dengan kata lain dapat dijadikan sebuah jembatan dalam perekonomian apabila pemerintah mengharapkan keberhasilan yang lebih baik (Halim, 2002:128). Maka dari itu, suatu perencanaan yang matang dalam sebuah upaya pembangunan menjadi unsur yang penting demi meningkatnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik.

Dalam sebuah pembangunan, hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah hendaknya dijalin secara baik. Tidak hanya hubungan antara pusat dan daerah, namun sektor swasta juga dapat membantu pelaksanaan pembangunan sehingga hubungan antar pemerintah dan sektor swasta juga perlu terjalin dengan baik. Menurut Subandi (2008:133), pembangunann daerah adalah proses yang berjalan antara pemerintah daerah dengan masyarakat melalui pengelolaan potensi dan juga sumber daya yang dimiliki oleh setiap darah, serta membangun kerjasama dengan sektor swasta sehingga mampu menstimulus perkembangan dari segi pelaksanaan kegiatan ekonomi atau pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah. Cooray (2009), mengatakan pertumbuhan ekonomi akan tercipta apabila pemerintah daerah memiliki tata pemerintahan yang baik. Menurut Nugraeni (2011:4), pemerintah daerah akan menyesuaikan segala pengeluarannya dengan perubahan yang terjadi dalam penerimaan daerahnya.

Pendapatan dan pengeluaran pemerintah memiliki hubungan yang sangat penting terutama relevansinya terhadap suatu kebijakan yang akan diambil dan terkait dengan penggunaan anggaran (Liliana *et al.*,2011:241).

Gejala pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui salah satu indikatornya yaitu Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) karena PDRB dapat menggambarkan aktivitas perekonomian yang dilaksanakan dan dapat dicapai pada satu periode. Menurut Hasan (2012) dalam Sugiarti dan Suparmi (2014:6), pertumbuhan ekonomi adalah sebuah alat ukur dari sebuah pembangunan karena perkembangan aktivitas sektor ekonomi dapat diukur melalui pertumbuhan ekonomi. Secara makro apabila pada suatu daerah, produksi barang dan jasanya meningkat maka setiap tahunnya tercermin pada peningkatan nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per tahun, sedangkan secara mikro tercermin melalui Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) perkapitanya (Djoyohadikusumo, 1994:1). Mengamati pada data statistik, data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tersaji dua kategori penilaian diantaranya atas dasar harga belaku dan atas dasar harga konstan.

Perekonomian yang tumbuh dan berkembang tidak bisa lepas dari peran pemerintah melalui upaya-upaya yang direncanakan dan dilaksanakan dengan tujuan kesejahteraan masyarakat. Ikeji (2011), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah dapat dipicu dari terwujudnya desentralisasi fiskal. Menurut Bodman *et al.* (2009), Peningkatan atau penurunan tingkat pertumbuhan ekonomi merupakan dampak dari pelimpahan tanggung jawab dari pemerintah pusat menjadi pemerintah daerah sebagai wujud terciptanya desentralisasi fiskal.

Sedangkan menurut Zulyanto (2010) dalam Sudewi dan Wirathi (2013:137), menyebutkan bahwa desentralisasi fiskal yang dikenal dengan *money follow function* merupakan pemerintah daerah diberikan wewenang oleh pemerintah pusat tidak hanya mengatur dan mengurus wilayah, namun disertai pembagian wewenang pada sisi penerimaan pendanaan. Efisiensi sektor publik dapat tercipta dari adanya desentralisasi fiskal dimana melalui efisiensi tersebut dapat berdampak dalam jangka panjang bagi pertumbuhan ekonomi (Faridi,2011). Hal serupa dikemukakan Vasquez (2001), yang menyatakan bahwa apabila desentralisasi fiskal mengutamakan pengeluaran publik, maka desentralisasi akan berdampak langsung terhadap PDRB yang mencerminkan pertumbuhan ekonomi suatu daerah.

Pertumbuhan ekonomi tercermin dari usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam mendongkrak PAD yang tinggi serta mampu mengelolanya dengan baik sehingga dapat dilihat bahwa peran otonomi daerah dalam memberdayakan potensi daerah sudah berjalan dengan baik. Tidak hanya melihat dari sumber daya yang dapat diberdayakan dengan baik, namun peningkatan kualitas sumber daya, baik alam (SDA) maupun manusianya (SDM) yang ada tentunya dapat membantu mempercepat proses pertumbuhan ekonomi. Pendapatan asli daerah (PAD) yang tinggi merupakan dambaan bagi setiap daerah karena pendapatan asli daerah yang tinggi dapat menandakan bahwa pemerintah daerah berhasil melaksanakan otonomi daerah dengan baik.

Pergerakan aktivitas ekonomi dalam memberikan tambahan penghasilan kepada masyarakat selama kurun waktu tertentu dapat ditunjukkan oleh tingkat

pertumbuhan ekonomi. Apabila pertumbuhan ekonomi stagnan atau menurun meskipun daerah mampu menjaring pendapatan asli daerah yang tinggi, pengembangan daerah tersebut tidak dapat dikatakan berhasil. Besaran atau jumlah PAD yang diterima suatu daerah sebaiknya tidak menjadi ukuran dari pergerakan aktivitas perekonomian, namun diukur dari sejauh mana PAD tersebut dalam mengatur aktivitas perekonomian di daerah, sehingga selanjutnya dapat berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat (Sidik,2000) dalam Maryati dan Endrawati,2010:2).

Penelitian sebelumnya oleh Chang dan Ho Ho (2002) dalam Maryati (2010:2) terkait PAD dan PDRB, dinyatakan bahwa hasil analisis elastisitas PAD terhadap PDRB dapat mencerminkan pengaruh PAD terhadap pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya, penelitian oleh Maryati dan Endrawati (2010) menyebutkan PAD dan DAU berpengaruh signifikan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menandakan bahwa semakin meningkatnya penerimaan pendapatan asli daerah atau dana alokasi umum, maka meningkat pula penerimaan PDRBnya. Alexiou (2009), menyatakan bahwa pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat dipengaruhi oleh pengalokasian belanja modal melalui anggaran dana alokasi umum yang dilakukan oleh pemerintah daerah.

Penelitian yang menggunakan variabel PAD dan DAU sebagai variabel *independent* dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi juga dilakukan oleh Permasari (2013) yang memberikan hasil bahwa PAD dan DAU berpengaruh signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini menandakan bahwa apabila PAD meningkat, maka dana yang dimiliki daerah untuk menggali dan

mengembangkan potensi yang dimiliki akan meningkat pula, sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Begitu juga DAU, apabila daerah menerima DAU yang tinggi, maka akan meningkatkan nilai PDRB pemerintah daerah tersebut karena DAU berperan dalam belanja pemerintah daerah yang berdampak pada pertumbuhan ekonomi. Hal serupa juga dikemukakan oleh Felix (2012:1), bahwa melalui penerimaan dana alokasi umum, pengalokasian belanja rutin yang kurang produktif sebaiknya lebih rendah dari belanja modal. Pemerintah daerah seharusnya memperhatikan hal tersebut sehingga belanja modal yang mengarah pada peningkatan infrastruktur dapat menunjang pertumbuhan ekonomi.

Undang-Undang Nomer 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Daerah menjelaskan bahwa dibutuhkan sumber-sumber pembiayaan guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat dalam rangka mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan pembangunan daerah. Dalam undang-undang tersebut terdapat ketentuan yaitu memberikan konsekuensi terhadap kewenangan yang luas, bertanggung jawab dan luas secara proporsional pada sisi pendapatan daerah yang ditandai dengan potensi sumber daya yang dibagi dan dapat dimanfaatkan, dengan tujuan membiayai otonomi daerah sesuai tingkatan daerah otonom. Berdasarkan Undang-Undang No. 33 tahun 2004, pembiayaan penyelenggaraan desentralisasi berasal dari pendapatan daerah yang didapat dari penjarangan pendapatan asli daerah (PAD), penerimaan dana perimbangan dan lain-lain pendapatan daerah yang sah.

Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, pemerintah daerah memperoleh dana yang berasal dari anggaran pendapatan belanja negara (APBN) yang disebut

dana perimbangan, dimana dana perimbangan ini berfungsi untuk membiayai kebutuhan suatu daerah. Selain itu dana perimbangan juga bermanfaat dalam mengurangi kesenjangan fiskal antara hubungan vertikal antar daerah dan pusat, serta hubungan horizontal antar daerah. Dana perimbangan ini terdiri dari dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK) dan dana bagi hasil. Kuncoro (2004:1) menyatakan bahwa dana perimbangan merupakan salah satu sumber dana yang penting dalam mempengaruhi perekonomian regional. Sama halnya seperti pendapatan daerah lainnya, dana perimbangan digunakan untuk mendanai proses pembangunan daerah melalui belanja langsung dalam upaya mendorong pertumbuhan ekonomi secara umum dan menciptakan kesejahteraan di seluruh masyarakat.

Malik *et al.* (2006), menyatakan bahwa strategi yang efektif dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah desentralisasi fiskal. Hal senada juga disampaikan oleh Lin dan Liu (2000:1), dimana pertumbuhan ekonomi suatu daerah dapat mengalami perubahan yang berarti melalui desentralisasi fiskal.

Terwujudnya pertumbuhan ekonomi tidaksemerata-mata karena terjadi pembangunan infrastruktur dan sarana maupun prasarana pada suatu daerah, melainkan peningkatan kualitas SDM juga perlu mendapat perhatian. Peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) dapat dilakukan melalui pendekatan bidang sosial kemasyarakatan terkait pada bidang kesehatan, pendidikan, serta bidang ekonominya, sehingga dapat mengurangi kesenjangan sosial, menekan tingkat pengangguran dan memberantas buta huruf antar kabupaten/kota. Menurut Eric (2001:101), menyatakan bahwa suatu negara kurang mampu menunjukkan

pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan akibat rendahnya tingkat pendidikan. Hal serupa juga dikemukakan oleh Dao (2012:77), yang menyatakan bahwa peningkatan pada sektor pendidikan perlu dilakukan pemerintah karena melalui hal tersebut dapat memberikan dampak positif terhadap *human capital* dan pertumbuhan ekonomi.

Pelaksanaan pembangunan di beberapa negara, dalam mencapai tujuannya guna meningkatkan pembangunan manusia terdapat beberapa hal yang dapat dilaksanakan oleh pemerintah diantaranya pemerataan distribusi, pengalokasian anggaran secara tepat dan memadai dalam aspek pendidikan dan kesehatan. Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hal-hal yang terkait kepentingan publik semestinya mendapatkan pengalokasian anggaran yang lebih besar oleh pemerintah daerah. Menurut Ping dan Bai (2005:1) menyatakan bahwa barang publik yang sifatnya mendasar seperti kesehatan, pendidikan, sistem jaminan sosial, dan pembangunan infrastruktur menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Menurut Arsyad (2004:36), besar kecilnya proporsi anggaran untuk pembangunan di sektor kesehatan dan pendidikan perlu diperhatikan sebagai cerminan apakah pemerintah mempersiapkan kebijakan yang mendukung sisi pembangunan manusia atau tidak. Besarnya pembagian anggaran yang dialokasikan pada sektor pendidikan dan juga kesehatan tersebut mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap kesejahteraan masyarakat, sehingga masyarakat mendapatkan manfaat langsung dari pertumbuhan ekonomi melalui

pembangunan daerah yang selanjutnya memberikan dampak terhadap kesejahteraan.

Perkembangan kesejahteraan masyarakat dapat dikatakan sebagai hal yang penting pada proses perencanaan pembangunan. Terdapat beberapa indikator yang digunakan dalam mengamati kesejahteraan masyarakat. Pembangunan manusia sebagai proses dalam memperluas beragam pilihan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia dari sisi pendidikan, kesehatan dan daya beli (Nehen, 2012:82). Sedangkan menurut *United Nation for Development Program* (UNDP) dalam Swandewi (2014:6), menyatakan pembangunan manusia adalah model pembangunan dalam upaya pemberdayaan masyarakat dengan cara menumbuhkan dan memperluas pilihan bagi masyarakat. Perkembangan kesejahteraan masyarakat semestinya dipantau oleh pemerintah agar pemerintah dapat merencanakan perbaikan pada sisi atau komponen kesejahteraan masyarakat yang masih minim atau kurang.

Pemerintah daerah maupun masyarakat Provinsi Bali dalam melihat dan mengamati perkembangan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat terlihat dari angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) pada kabupaten/kota di Provinsi Bali. Tingkat keberhasilan perkembangan kesejahteraan masyarakat ke arah yang lebih baik dapat diukur melalui nilai IPM atau Human Development Indeks (HDI). Dalam penelitian ini digunakan IPM sebagai gambaran untuk mengamati tingkat kesejahteraan dalam bentuk satu satuan indeks kesejahteraan. Berikut merupakan nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota di Provinsi Bali:

Tabel 1.
Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di kabupaten/kota
di Provinsi Bali periode 2008-2013

Kabupaten/ Kota	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Buleleng	69,67	70,26	70,69	71,12	71,48	72,54
Jembrana	72,02	72,45	72,69	73,18	73,24	74,29
Tabanan	73,73	74,26	74,57	75,24	75,35	76,19
Badung	74,12	74,49	75,02	75,35	75,42	76,37
Gianyar	72,00	72,43	72,73	73,43	73,57	75,02
Bangli	69,72	70,21	70,71	71,42	71,43	72,28
Klungkung	69,66	70,19	70,54	71,02	71,14	72,25
Karangasem	65,46	66,06	66,42	67,07	67,31	68,47
Denpasar	77,18	77,56	77,94	78,31	78,62	79,41
Bali	70,92	71,52	72,28	72,84	73,49	74,11

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2014

Secara nasional Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Provinsi Bali menduduki peringkat 15 pada tahun 2013 (Bappenas,2014). Nilai IPM di Provinsi Bali selalu mengalami peningkatan dari angka 70,92 di tahun 2008 hingga 74,11 di tahun 2013. Namun masih terdapat empat kabupaten yang memiliki angka IPM di bawah IPM Provinsi Bali yaitu kabupaten Buleleng, Bangli, Klungkung dan Karangasem. Pelaksanaan desentralisasi dalam mencapai keberhasilan otonomi daerah tentunya mengharapkan terwujudnya suatu tujuan yaitu kesejahteraan masyarakat. Sebagai contoh, salah satu kabupaten yang angka Indeks Pembangunan Manusia masih berada dibawah rata-rata Provinsi Bali, apabila dilihat dari masing-masing indikatornya dapat dijelaskan melalui Tabel 2 berikut:

Tabel 2.
Indeks Pembangunan Manusia dan Komponennya Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2013

Kabupaten / Kota		AHH	AMH	RLS	PPP (Rp 000)	IPM
1.	Jembrana	72.31	92.65	7.87	640.30	74.29
2.	Tabanan	74.91	91.92	8.40	643.24	76.19
3.	Badung	72.24	93.93	9.51	648.25	76.37
4.	Gianyar	72.56	89.38	8.90	647.37	75.02
5.	Klungkung	69.52	84.47	7.43	661.73	72.25
6.	Bangli	72.18	85.91	6.70	645.69	72.28
7.	Karangasem	68.32	76.94	5.90	657.79	68.47
8.	Buleleng	70.00	90.53	7.55	643.38	72.54
9.	Denpasar	73.46	97.95	11.05	652.54	79.41

Sumber: BPS Provinsi Bali, 2014

Keterangan:

AHH = Angka Harapan Hidup

AMH = Angka Melek Huruf

RLS = Rata-Rata Lama Sekolah

PPP = *Purchasing Power Parity* (Paritas Daya Beli)

Empat kabupaten yang termasuk ke dalam kabupaten yang indeks pembangunan manusianya berada di bawah rata-rata indeks pembangunan Provinsi Bali yaitu Kabupaten Buleleng, Bangli, Klungkung dan Karangasem. Sebagai contoh, Kabupaten Karangasem yang angka Indeks Pembangunan Manusiannya pada tahun 2013 sebesar 68,47 yang berada di bawah rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali dengan angka 74,11 dijabarkan melalui indikatornya antara lain:

- (1) Pada indikator kesehatan yang diukur melalui angka harapan hidup menunjukkan pada tahun 2013, AHH sebesar 68,32. Secara nasional, menurut Laporan Nasional Evaluasi Kinerja Pembangunan di 33 Provinsi Tahun 2014 (Bappenas,2014), batas minimal indikator angka harapan hidup yang dikatakan sejahtera sebesar 70,07 persen sedangkan angka harapan hidup Kabupaten Karangasem menunjukkan angka 68,32 persen yang berarti bahwa pemerintah perlu memperhatikan kesejahteraan masyarakat dari segi kesehatan di kabupaten tersebut, sehingga program-program pemerintah di bidang kesehatan perlu ditingkatkan.
- (2) Pada indikator bidang pendidikan yang dilihat berdasarkan rata-rata lama sekolah dan angka melek huruf, pada Kabupaten Karangasem menunjukkan angka 76,94 untuk indikator angka melek huruf dan 5,90 untuk indikator rata-rata lama sekolah dengan capaian secara nasional menurut Laporan Nasional Evaluasi Kinerja Pembangunan di 33 Provinsi Tahun 2014 (Bappenas,2014) sebesar 94,14 untuk angka melek huruf dan 8,14 untuk rata-rata lama sekolah. Hal ini menunjukkan pada Kabupaten Karangasem juga belum sejahtera dari segi pendidikan sehingga angka Indeks Pembangunan Manusianya masih berada dibawah rata-rata Indeks Pembangunan Manusia Provinsi Bali.
- (3) Pada indikator kesejahteraan yang diukur berdasarkan daya beli masyarakatnya, di Kabupaten Karangasem menunjukkan angka Rp.

657.790,- yang berada di atas standar *Purchasing Power Parity* menurut Badan Pusat Statistik Nasional sebesar Rp. 360.000,- per bulan.

Dalam hal ini menandakan bahwa kabupaten Karangasem sebagai salah satu contoh yang menunjukkan angka IPM dibawah rata-rata IPM Provinsi Bali mengalami keterbelakangan dari sisi pendidikan dan kesehatannya.

Hal ini mendorong penulis untuk meneliti pengaruh PAD dan DAU terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di kabupaten/kota Provinsi Bali. Penelitian ini memiliki perbedaan dengan penelitian sebelumnya yaitu penggunaan teknik analisis jalur untuk mengetahui pengaruh variabel PAD dan DAU terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi pada kabupaten/kota di Provinsi Bali dalam kurun waktu 6 tahun yaitu dari tahun 2008 sampai tahun 2013.

Melalui latar belakang yang telah dipaparkan, maka dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan dalam penelitian ini diantaranya: (a) bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali tahun 2008-2013? (b) bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali tahun 2008-2013? (c) bagaimana pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali tahun 2008-2013?

Berdasarkan rumusan masalah diatas, tujuan penelitian yang ingin dicapai antara lain: (a) untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali tahun 2008-2013, (b) untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali tahun 2008-2013, dan (c) untuk menganalisis pengaruh pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali tahun 2008-2013.

Penelitian ini secara teoritis diharapkan dapat dijadikan media penerapan teori dan konsep yang didapat selama masa perkuliahan mengenai pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat serta dapat meningkatkan wawasan pengetahuan melalui berbagai temuan penelitian. Sedangkan secara praktis, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi ide atau pemikiran kepada pemerintah dalam meningkatkan dan mengalokasikan sumber-sumber pendapatan yang diterima serta upaya pemerintah dalam bekerja sama dengan masyarakat dalam menggali dan mengelola sumber daya pada daerah sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan kajian pustaka dan hasil penelitian sebelumnya, maka hipotesis yang dapat dibentuk antara lain:

1. Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali tahun 2008-2013.

2. Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum dan pertumbuhan ekonomi berpengaruh kesejahteraan masyarakat di Provinsi Bali tahun 2008-2013.
3. Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi di Provinsi Bali tahun 2008-2013.

METODE PENELITIAN

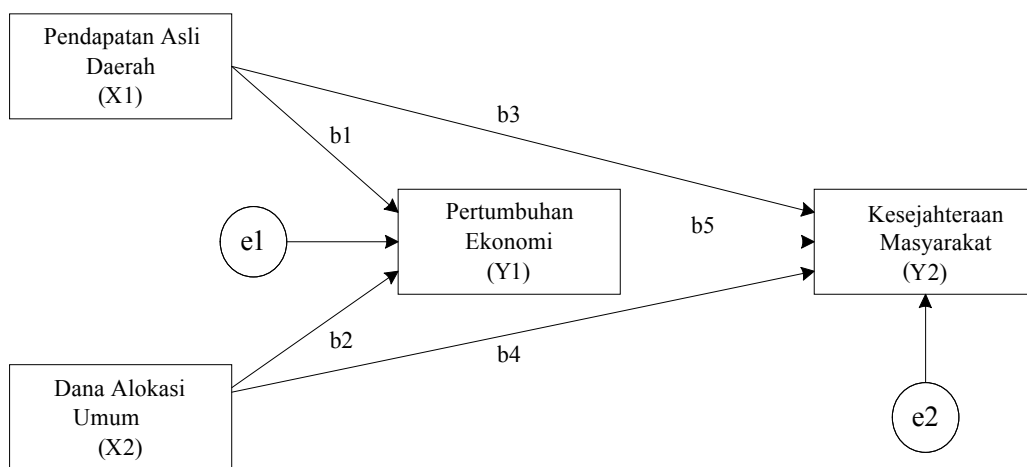
Penelitian ini berlokasi di kabupaten/kota yang terdapat di Provinsi Bali. Dipilihnya lokasi ini karena Bali masih memiliki masalah dari segi ketimpangan pendapatan antar daerahnya sehingga kesejahteraan masyarakat Bali belum sepenuhnya dapat dirasakan secara merata. Menurut jenisnya, dalam penelitian ini menggunakan data data kualitatif dan data kuantitatif. Sedangkan berdasarkan sumbernya menggunakan data sekunder.

Metode observasi non partisipan merupakan metode yang dipilih dalam pengumpulan data yang dilakukan, yang terdiri dari: mempelajari, mencatat, mengamati uraian buku literatur, karya ilmiah berupa jurnal dan skripsi, artikel, serta dokumen – dokumen yang terdapat dari instansi terkait seperti BPS, Biro Keuangan, *browsing* mengenai PAD, DAU, pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Teknik analisis jalur (*path analysis*) merupakan teknik analisis yang digunakan dalam menguji pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung variabel-variabel yang terdapat dalam penelitian ini. Analisis jalur adalah pengembangan dari analisis regresi linier berganda dengan penggunaan anak panah untuk menunjukkan hubungan antar variabel dalam analisis jalur. *Path*

Analysis berguna untuk memperlihatkan dan menguji model keterkaitan yang berbentuk sebab akibat antar variabel (Suyana Utama, 2012:156). Pengujian hubungan variabel yang digunakan didasarkan teori yang menyatakan memiliki hubungan secara kausal.

Gambar 1.
Model Analisis Jalur



Berdasarkan Gambar 1. dapat dibuat persamaan struktural yang menunjukkan hubungan antar variabel yang dihipotesiskan sebagai berikut:

$$Y_1 = b_1X_1 + b_2X_2 + e_1 \dots \dots \dots (1)$$

$$Y_2 = b_3X_1 + b_4X_2 + b_5Y_1 + e_2 \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

- Y₁ = Pertumbuhan Ekonomi
- X₁ = Pendapatan Asli Daerah
- X₂ = Dana Alokasi Umum
- Y₂ = Kesejahteraan Masyarakat
- b₁,b₂,b₃,b₄,b₅ = koefisien dari masing-masing variabel
- e₁,e₂ = variabel pengganggu

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pengujian hipotesis penelitian dilakukan melalui dua tahap, yaitu: (a) pengujian pengaruh langsung, yaitu menguji pengaruh langsung PAD dan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi, pengaruh langsung PAD, DAU dan pertumbuhan

ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat serta (b) Pengaruh tidak langsung variabel PAD dan DAU terhadap kesejahteraan masyarakat melalui variabel pertumbuhan ekonomi. Hasil pengujian persamaan struktural 1 dan persamaan struktural 2 dapat dilihat pada Tabel 3 berikut:

Tabel 3.
Hasil Ringkasan Koefisien Jalur dan Signifikansi Hubungan Antarvariabel

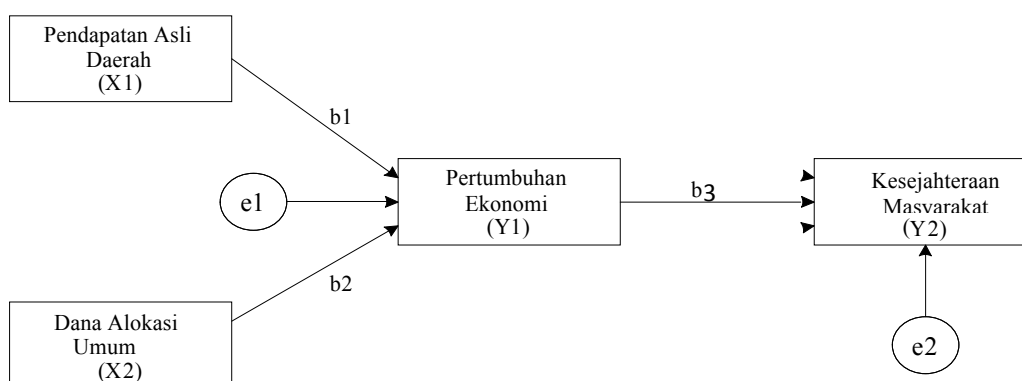
Regresi	Koef. Reg. Standar	Standar Error	T. Hitung	P. Value	Keterangan
X1 → Y1	1,002	0,011	14,045	0,000	Signifikan
X2 → Y1	0,197	0,001	2,760	0,008	Signifikan
X1 → Y2	-0,266	0,045	-0,962	0,341	Tidak Signifikan
X2 → Y2	-0,062	0,001	-0,464	0,645	Tidak Signifikan
Y1 → Y2	0,885	0,225	3,596	0,001	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2015

Sesuai dengan teori trimming, jalur-jalur yang tidak signifikan dapat dihilangkan. Cara tersebut dilakukan untuk mendapatkan model yang lebih valid. Untuk memperoleh model yang lebih valid dalam penelitian ini dilakukan modifikasi dengan menghapus pengaruh langsung pendapatan asli daerah (X1) dan dana alokasi umum (X2) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y2). Sehingga terjadi perubahan pada model analisis jalur menjadi:

Gambar 2.

Gambar Analisis Jalur



Berdasarkan Gambar 2. dapat dibuat persamaan struktural yang menunjukkan hubungan antar variabel yang dihipotesiskan sebagai berikut:

$$Y_1 = b_1X_1 + b_2X_2 + e_1 \dots \dots \dots (1)$$

$$Y_2 = b_3Y_1 + e_2 \dots \dots \dots (2)$$

Keterangan:

- Y₁ = Pertumbuhan Ekonomi
- X₁ = Pendapatan Asli Daerah
- X₂ = Dana Alokasi Umum
- Y₂ = Kesejahteraan Masyarakat
- b₁, b₂, b₃ = koefisien dari masing-masing variabel
- e₁, e₂ = variabel pengganggu

Dari Gambar 2. dapat dijelaskan pengujian hipotesis penelitian dilakukan melalui dua tahapan yang baru diantaranya: (a) pengujian pengaruh langsung, yaitu menguji pengaruh langsung PAD dan DAU terhadap pertumbuhan ekonomi, dan (b) pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Hasil pengujian persamaan struktural 1 dan persamaan struktural 2 yang baru dapat dilihat pada Tabel 2 berikut ini:

Tabel 4.
Hasil Ringkasan Koefisien Jalur dan Signifikansi Hubungan Antarvariabel

Regresi	Koef. Reg. Standar	Standar Error	T. Hitung	P. Value	Keterangan
X1 → Y1	1,002	0,011	14,045	0,000	Signifikan
X2 → Y1	0,197	0,001	2,760	0,008	Signifikan
Y1 → Y2	0,671	0,106	6,520	0,000	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2015

Hasil pengujian pada Tabel 4 memperlihatkan pengaruh langsung pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi, diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 1,002 dan nilai t hitung sebesar 14,045 > nilai t tabel sebesar 1,645 ini berarti H₀ ditolak H₁ diterima, artinya pendapatan asli daerah (X₁) berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan

ekonomi (Y_1). Hubungan positif variabel pendapatan asli daerah terhadap pertumbuhan ekonomi yang diperoleh, sesuai dengan teori W.W. Rostow yang menyatakan bahwa pada fase prasyarat tinggal landas, masyarakat mempersiapkan diri untuk mencapai pertumbuhan berdasarkan kekuatan sendiri dan selanjutnya pertumbuhan ekonomi akan terjadi secara otomatis (Arsyad, 2004). Hasil ini juga didukung oleh penelitian Mawarni, dkk (2013), dimana dalam penelitiannya menyatakan bahwa variabel pendapatan asli daerah berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Aceh. berpengaruh positif hasil serupa juga dinyatakan dalam penelitian Setiyawati dan Hamzah (2007), menyatakan bahwa PAD berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi hal ini dikarenakan dalam upaya menumbuhkan dan mengembangkan perekonomian daerah, maka retribusi daerah dan pajak daerah yang dipungut, dikembalikan lagi kepada masyarakat melalui pembangunan infrastruktur dan lain-lain sesuai kebutuhan dan kemampuan daerah.

Berdasarkan hasil analisis di atas, dapat dijelaskan bahwa peningkatan PAD pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dimana apabila pendapatan asli daerah meningkat maka berarti pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Bali meningkat. Hal ini menandakan pembangunan yang dilaksanakan pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali sudah berhasil.

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4 pengaruh langsung dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi, diperoleh nilai *standardized coefficient*

beta sebesar 0,197 dan nilai *t* hitung sebesar 2,760 > *t* tabel sebesar 1,645 ini berarti H_0 diterima H_1 ditolak, artinya dana alokasi umum (X_2) memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi (Y_1). Hubungan positif dan signifikan antara variabel dana alokasi umum terhadap pertumbuhan ekonomi yang diperoleh dalam penelitian ini, sesuai dengan penelitian Maryati dan Endrawati (2010) dimana didalamnya dinyatakan bahwa belanja pembangunan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil serupa juga dikemukakan Permanasari (2013) menyatakan bahwa dana alokasi umum berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini karena dana alokasi Umum berperan sangat signifikan dimana belanja daerah didominasi oleh DAU, sehingga melalui belanja daerah ini mampu melaksanakan pembangunan yang sifatnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hasil analisis di atas, dapat dijelaskan bahwa peningkatan DAU pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan perhitungan pada Tabel 4 pengaruh langsung pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat, diperoleh nilai *standardized coefficient beta* sebesar 0,671 dan nilai *t* hitung sebesar 6,520 > *t* tabel sebesar 1,645 ini berarti H_0 ditolak H_1 diterima, artinya pertumbuhan ekonomi (Y_1) berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2). Hubungan positif dan signifikan antara variabel pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat yang diperoleh dalam penelitian ini sesuai dengan Setyowati (2012) bahwa adanya hubungan positif dan signifikan pada pengaruh pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat. Hal ini menandakan dalam

peningkatan pertumbuhan ekonomi dilihat dari besaran PDRBnya. Semakin tinggi tingkat PDRB, maka peluang masyarakat untuk memperoleh pendidikan dan kesehatan yang lebih layak akan meningkat atau dengan terciptanya peningkatan pertumbuhan ekonomi pada suatu daerah, maka masyarakat memiliki kesempatan untuk mengalokasikan penghasilannya di sektor pendidikan dan kesehatan. Dalam penelitian ini, dari adanya peningkatan pada tingkat pertumbuhan ekonomi, selanjutnya berdampak pada peningkatan kesejahteraan yang dirasakan masyarakat melalui nilai IPM yang semakin meningkat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali periode 2008-2013.

Terdapat indikator pengecekan validitas model yaitu dengan koefisien determinasi total yang hasilnya menunjukkan sebagai berikut :

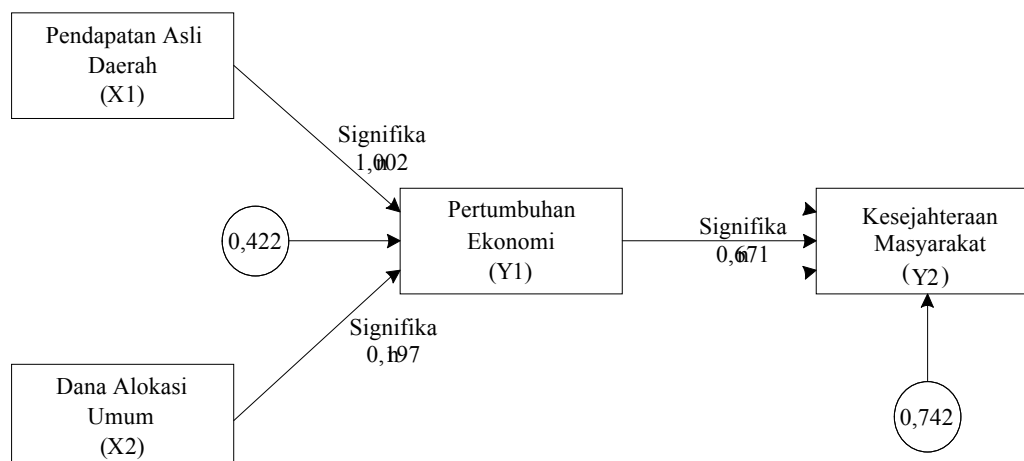
$$\begin{aligned} R^2_m &= 1 - (e_1)^2 - (e_2)^2 \\ &= 1 - (0,422)^2 - (0,742)^2 \\ &= 0,90 \end{aligned}$$

Keterangan :

R^2_m = Koefisien determinasi total
 e_1, e_2 = Nilai kekeliruan taksiran standar

Berdasarkan hasil perhitungan diatas, diperoleh bahwa sebesar 90 persen keragaman data tersebut dapat diterangkan oleh model. Hal ini menandakan bahwa informasi yang terkandung pada data adalah sebesar 90 persen yang dapat dijelaskan oleh model, sedangkan sebesar 10 persen sisanya dijelaskan oleh variabel yang lainnya yang dalam hal ini tidak dimasukkan ke dalam model.

Berdasarkan ringkasan koefisien jalur di atas maka dapat dibuat diagram jalur seperti dibawah ini.

Gambar 3.**Diagram Hasil Analisis Jalur**

Sumber: Tabel 4

Berdasarkan Gambar 3 menunjukkan bahwa terdapat hubungan *full mediation*, dimana *full mediation* berarti bahwa variabel *independent* tidak mampu secara signifikan mempengaruhi variabel *dependent* secara langsung tanpa melalui variabel mediasi. Pengujian pengaruh tidak langsung PAD dan DAU terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi dapat dilihat melalui nilai z dari koefisien ab, yang diperoleh dengan menghitung nilai S terlebih dahulu.

Tabel 5.
Hasil Ringkasan Pengaruh Tidak Langsung

Pengaruh Antarvariabel	Variabel Mediasi	Sab	Z	Keterangan
X1 → Y2	Y1	0,0113	59,3131	Signifikan
X2 → Y2	Y1	0,0004	302,828	Signifikan

Sumber: Data diolah, 2015

Berdasarkan Tabel 5. nilai Z hitung sebesar $59,3131 > |1,96|$. Artinya pertumbuhan ekonomi (Y_1) merupakan variabel intervening dalam pendapatan asli daerah (X_1) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) di Provinsi Bali atau

dapat dikatakan PAD berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan Tabel 2. nilai Z hitung sebesar $302,828 > |1,96|$. Artinya pertumbuhan ekonomi (Y_1) merupakan variabel intervening dalam dana alokasi umum (X_2) terhadap kesejahteraan masyarakat (Y_2) di Provinsi Bali atau dapat dikatakan dana alokasi umum berpengaruh secara tidak langsung terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi.

Tabel 6.
Hasil Pengaruh Langsung, Pengaruh Tidak Langsung dan Pengaruh Total Variabel Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2008-2013

Hubungan Variabel	Pengaruh		Total
	Langsung	Tidak Langsung Melalui Y_1	
$X_1 \longrightarrow Y_1$	1,002	-	1,002
$X_1 \longrightarrow Y_2$	-	0,672	0,672
$X_2 \longrightarrow Y_1$	0,197	-	0,197
$X_2 \longrightarrow Y_2$	-	0,132	0,132
$Y_1 \longrightarrow Y_2$	0,671	-	0,671

Sumber: Data diolah, 2015

Nilai pengaruh tidak langsung PAD terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 0,672 berarti pengaruh yang dihasilkan PAD melalui pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat sebesar 67,2 persen. Nilai pengaruh tidak langsung dana alokasi umum terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi sebesar 0,132 berarti pengaruh dana alokasi umum melalui pertumbuhan ekonomi terhadap kesejahteraan masyarakat adalah sebesar 13,2 persen.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan pemaparan hasil analisis diatas, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu sebagai berikut: (a) Pendapatan asli daerah dan dana alokasi

umum memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi, (b) Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum tidak berpengaruh terhadap kesejahteraan masyarakat, sedangkan pertumbuhan ekonomi memiliki pengaruh signifikan dan positif terhadap kesejahteraan masyarakat, serta (c) Pendapatan asli daerah dan dana alokasi umum berpengaruh signifikan terhadap kesejahteraan masyarakat melalui pertumbuhan ekonomi.

Dengan mengamati hasil analisis dan simpulan yang telah dipaparkan, maka dapat diajukan beberapa saran diantaranya: (a) pemerintah daerah diharapkan dapat mengalokasikan penerimaannya dengan baik dan melakukan efisiensi terhadap belanja daerah dalam hal pembangunan, baik dalam hal infrastruktur, prasarana dan sarana di bidang sosial ekonomi, kesehatan dan pendidikan sehingga secara langsung dapat berdampak bagi kesejahteraan masyarakat, (b) diharapkan pemerintah mampu mengenali potensi dan sumber daya yang dapat dikembangkan pada setiap daerah karena pengembangan potensi dari sumber daya dimiliki masing-masing daerah dapat menjaring pendapatan asli daerah yang lebih tinggi sehingga daerah dapat mandiri secara fiskal (c) diharapkan pemerintah daerah kabupaten yang masih memiliki angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di bawah angka IPM Provinsi Bali, dapat mengalokasikan dana dengan pemilihan upaya pembangunan yang tepat sasaran melalui program-program yang menyentuh langsung pada kepentingan prioritas masyarakat, serta (d) Hasil analisis yang telah dipaparkan sebelumnya memperlihatkan bahwa masih terdapat variabel lainnya yang tidak termasuk ke dalam model yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat sebesar 10 persen. Disarankan, peneliti yang tertarik

dalam meneliti kesejahteraan masyarakat dapat memperluas objek penelitian dengan cara menambah variabel lain yang mempengaruhi kesejahteraan masyarakat pada kabupaten/kota di Provinsi Bali.

REFERENSI

- Akudugu, Jonas Ayaribilla. 2012. *Accountability in local Government revenue management: who does what?*. *Journal of Sustainable Development*.
- Alexiou, Constantinos. 2009. *Government Spending and Economic Growth : Econometric Evidence from the South Eastern Europe (SSE)*. *Journal of Economic and Social Research*.
- Arsyad, Lincoln. 2004. *Ekonomi Pembangunan*, Edisi Keempat, Cetakan Kedua, Yogyakarta: Bagian Penerbitan Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN Yogyakarta.
- Badan Pusat Statistik Nasional. 2014. <http://bps.go.id>. Diunduh pada 5 Juli 2015
- Badan Pusat Statistik Provinsi Bali . 2008. *Bali Dalam Angka*. Denpasar.
- _____.2008. *Bali Dalam Angka*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- _____.2009. *Bali Dalam Angka*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- _____.2010. *Bali Dalam Angka*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- _____.2011. *Bali Dalam Angka*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- _____.2012. *Bali Dalam Angka*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- _____.2013. *Bali Dalam Angka*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- _____.2014. *Bali Dalam Angka*. Bali: BPS Provinsi Bali.
- Biro Keuangan.2014.*Data Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Provinsi Bali*.Bali: Biro Keuangan
- Bappenas.2014.*Perkembangan Pembangunan Provinsi Bali 2014*.<http://www.simreg.bappenas.go.id>. (diakses 3 Juli 2015)
- _____.2014.*Laporan Evaluasi Kinerja Pembangunan di 33 Provinsi Tahun 2014*. <http://www.rc.bappenas.go.id>. (diakses 25 Agustus 2015)
- Bodman, P., Kelly Ana Heaton and Andrew Hodge. 2009. *Fiscal*

Decentralisation and Economic Growth: A Bayesian Model Averaging Approach. MRG@UQ Discussion Paper, School of Economics, University of Queensland.

Cooray, Arusha. 2009. Government Expenditure, Governance and Economic Growth. *www.palgrave-journals.com/ces/*.

Dao, Minh Quang. 2012. Government Expenditure and Growth in Developing Countries. *Progress in Development Studies 12*.

Dewi, Putu Ayu Krisna dan I Ketut Sutrisna. 2014. *Pengaruh kemandirian Keuangan Daerah dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Indeks Pembangunan Manusia di Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol 4 No. 1, tahun 2014. Universitas Udayana

Djoyohadikusumo, 1994. *Perkembangan Pemikiran Ekonomi*. Jakarta: PT. Pustaka

Eric Neumayer. 2001. *The Human Development Index and Sustainability — a constructive proposal*. *Ecological Economics Journal*.

Faridi, Muhammad Zahir. 2011. *Contribution of Fiscal Decentralization to Economic Growth: Evidence from Pakistan*. *Pakistan Journal of Social Sciences (PJSS) Vol. 31, No. 1 (June 2011)*

Felix, Olurankinse. 2012. *Analysis of the effectiveness of capital expenditure budgeting in the local government system of Ondo State, Nigeria*. *Journal of Accounting and Taxation*.

Halim, Abdul. 2002. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Ekonisia

Ikeji, Chibueze C. 2011. *Politics of Revenue of policy and Strategic Studies*.

Jhingan, M. L. 2002. *Ekonomi Perencanaan dan Pembangunan*. Edisi VIII, Jakarta: CV Rajawali

Kuncoro, Haryo. 2004. *Causality Between Total Government Expenditure, Total Tax Revenue, and Regional Income in the Case Of Municipalities'/Regency' Local Government in Indonesia*. *Journal*.

Liliana, Bunescu, Mihaiu Diana and Comaniciu Carmen. 2011. *Is There a Correlation between Government Expenditures, Population, Money Supply, and Government Revenues?*. *International Journal of Arts & Sciences*.

Lin, Justin Yifu dan Zhiqiang Liu. 2000. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in China*. *Economic Development and Cultural Change*. Chicago. Vol 49.

- Malik, Shahnawaz, Mahmood-ul-hassan and Shahzad Hussain. 2006. *Fiscal Decentralization and Economic Growth in Pakistan. Department of Economics, Bahauddin Zakariya University, Multan, Pakistan.*
- Maryati,Ulfi dan Endrawati.2010.*Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) terhadap Pertumbuhan Ekonomi:Studi Kasus Sumatera Barat.*Jurnal Akuntansi dan Manajemen,vol 5, No.2.
- Mawarni, Darwanis dan Abdullah, Syukriy. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Modal serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota di Aceh). *Jurnal Akuntansi.* Pascasarjana Universitas Syah Kuala.
- Nehen, Ketut. 2012. *Perekonomian Indonesia*, Denpasar: Udayana University Press.
- Nugraeni. 2011. Analisis Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Prediksi Belanja Daerah: Studi pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Indonesia. *Akmenika Upy.* Volume 8
- Permanasari.2013.*Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU),Dana Alokasi Khusus (DAK),Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi.*Artikel Publikasi Ilmiah.Universitas Muhammadiyah Surakarta
- Ping, Xin-Qiao and Jie Bai. 2005. Fiscal Decentralization Local Public Good Provision in China. *Economic Research.*
- Setyowati,Lilis dan Yohana Kus Suparwati.2012.*Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK,PAD Terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan Pengalokasian Anggaran Belanja Modal sebagai Variabel Intervening.*E-Jurnal Prestasi Vol. 9, No.1.STIE Jawa Tengah.
- Sriningsih, Siti. 2013. Analisis ketimpangan Fiskal Pasca Otonomi Daerah. E-Jurnal Edisi XXXIII tahun ke XXII, Vol 2, tahun 2013. Universitas Mataram
- Subandi.2008. *Ekonomi Pembangunan.*Bandung: Alfabeta
- Sudewi, Ni Nyoman Ayu dan I. G. A, Putu Wirathi.2013. *Pengaruh Desentralisasi Fiskal dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Kemiskinan di Provinsi Bali.* E-Jurnal Ekonomi Pembangunan, Vol. 2, No. 3, tahun 2013. Universitas Udayana

Sugiardi, Ni Putu Dwi Eka Rini dan Ni Luh Supadmi. 2014. *Pengaruh PAD, DAU, dan Silpa pada Belanja Modal dengan Pertumbuhan Ekonomi sebagai Pemoderasi*. E-Jurnal Akuntansi. Universitas Udayana

Swandewi, Anak Agung Istri Agung. 2014. *Pengaruh Dana Perimbangan dan Kemandirian Keuangan Daerah terhadap Keserasian Anggaran dan Kesejahteraan Masyarakat pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali*. E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis. Universitas Udayana

Suyana Utama., Made. 2012. *Aplikasi Analisis Kuantitatif*. Fakultas Ekonomi Universitas Udayana. Denpasar.

Vasquez, Jorge Martinez and Robert M. Mc-Nab. 2001. Fiscal Decentralization, Macrostability, and Growth. *Journal of Political Econom.*